

## ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penarikan objek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh lembaga pembiayaan terhadap debitur gagal bayar yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Lembaga pembiayaan tidak terlepas dari konsekuensi adanya gagal bayar yang berujung pada terjadinya kredit macet. Bilamana itu terjadi, tindakan yang dapat dilakukan lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan eksekusi terhadap barang yang dikreditkan. Proses eksekusi ini pada dasarnya harus dilakukan berdasarkan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan analisis deskriptif. Tahapan penelitian dilakukan dengan metode penelitian *library research* dan *field research*. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis dan studi lapangan dimana peneliti melakukan wawancara. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen atas eksekusi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo oleh lembaga pembiayaan dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika terjadi gagal bayar.

Kesimpulan dari penelitian ini, pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh Lembaga pembiayaan melalui jasa orang ketiga biasa disebut dengan *debt collector* masih ada yang melakukan penarikan tanpa adanya akta jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur gagal bayar merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur adanya penarikan oleh *debt collector*. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat ditempuh melalui beberapa cara, diantaranya dengan cara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Gagal Bayar, Jaminan Fidusia

## **ABSTRACT**

*The government has issued Legislative Regulations related to the recall of Fiduciary object particularly regarding motorized vehicles. Nevertheless, in practice, the recall cases of motorized vehicle by the creditor party toward the default debtor which contrary from the existing regulations are still many found. In the implementation of credit agreements with the creditor party, it is inseparable consequences of defaults which lead to bad credit. In case this is happens, the creditor party can take an implementation of executorial to the credited goods. Basically, this execution process has to apply based on the procedure that is not against the law.*

*This research is juridical normative and descriptive analysis research. The research stages performed the research methods of library research and field research. The data analysis used a juridical qualitative method. The technique of collecting data used documentation study as collecting legal materials data which are processed systematically and the field study through conducted interviews. The purpose to be achieved in this research is the legal protection for the debtor in executorial implementation of motorized vehicle that not yet surpassed the due date by the creditor party and what effort that can be done by the debtor if there is a default.*

*The conclusion of this research is there are still found the implementation of motorized vehicle recall by the creditor party through the service of third party called debt collector without the registered Fiduciary deed. The recall of motorized vehicles by the debt collector due the defaults debtor is unlawful acts because there are no laws governing the recall of Fiduciary object by debt collector. The mechanism for resolving this lawsuit can be obtained through several ways, including through litigation and non-litigation.*

*Keywords: Consumers' Protection, Default, Fiduciary*